



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Februari 2014

Halaman: 1

**206 ABDI DALEM KRATON DIWISUDA**

**Bupati Kulonprogo dan Walikota Yogya Naik Pangkat**

**SEBANYAK** 206 abdi dalem Kraton Yogyakarta, terdiri 89 punakawan dan 117 kaprajan terlihat serius mengikuti prosesi wisuda di Bangsal Kastriyan, Kraton Yogyakarta Selasa (4/2). Penerimaan surat kekancingan untuk abdi dalem punokawan dilakukan oleh Penghageng di Kawedanan Hagenng Punakawan Nitya Budaya GBPH Prabukusumo. Sedangkan untuk abdi dalem Kaprajan dilakukan oleh Wakil Penghageng Tepas Krato Mardowo GKR Pembayan.

Sejumlah kepala daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) DIY mendapat gelar baru dan kenaikan pangkat. Seperti Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang sebelumnya berpangkat Bupati Anom Prajakusumadipura naik menjadi Bupati Sepuh dengan gelar Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Kusumadipura. Sedangkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dengan gelar Hasta Husadadipura.

"Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Arie Yuwirin diangkat sebagai Rinyo Bupati Anom dengan gelar Nyi R Riya Kismamanggawati. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mendapat gelar Dirjo Hadi Taruna," kata Penghageng Tepas Dwarapura KRT Jatiningrat di Kraton Yogyakarta, Selasa

(4/2). Selain beberapa pejabat dan kepala daerah di lingkungan Pemda DIY, dalam acara wisuda abdi dalem kali ini, putra dari GKR Condokirono (cucu Sri Sultan HB X) mendapatkan gelar Raden Riyo Suryokusumo.

**\* Bersambung hal 7 kol 1**

Penghageng Tepas Panitikismo KGPH Hadiwinoto mengatakan, pemberian gelar bukan persoalan feodalis, tapi lebih pada pangkat kepegawaian. Karena jabatan sebagai lurah, wedhana adalah pangkat kepegawaian bukan merupakan hubungan darah.

"Saya berharap sebagai penjaga gawang kebudayaan, para abdi dalem bisa semaksimal mungkin, memberdayakan budaya kraton," ujar Hadiwinoto.

Ketika dimintai komentar terkait dengan keterlibatan putri Sultan dalam acara wisuda abdi dalem, Hadiwinoto menjelaskan, saat ini Kraton sedang melakukan beberapa penataan dan kaderisasi. Kaderisasi dilakukan pada semua pihak, baik putra dalem maupun *sedherek dalem* diminta keterlibatannya.

"Karena jumlah SDM yang ada terbatas. Sehingga semua harus mau belajar dan dioptimalisasi, baik abdi dalem maupun putra dalem," ungkapnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menuturkan, sebagai abdi yang baru saja dirinya bertekad untuk melestarikan budaya termasuk di lingkungan sekolah.

Mengingat gelar husada yang diberikan merupakan dokter atau juru husada, jadi tidak sekadar mengobati. Tapi juga menyembuhkan, *mengayomi* dan memberikan kenetratan pada masyarakat. "Sebagai abdi dalem berarti saya harus siap untuk mengabdikan diri bagi pelestarian budaya. Termasuk mengemban keistimewaan DIY pada pengembalian karakter masyarakat yang berbudaya," katanya.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, konsekuensi dari ke-

naikan pangkat berarti dirinya harus meningkatkan pengabdian pada Kraton dan masyarakat luas. Termasuk komitmen, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

"Saya mengabdikan sejak tahun 2009 sebagai bupati anom, mudah-mudahan dengan kenaikan pangkat tersebut bisa memotivasi saya menjadi lebih baik," kata Haryadi.

Komentar serupa dikemukakan Kepala BPN DIY Arie Yuwirin. Sebagai abdi dalem yang bertugas di pertanahan dirinya ingin membantu mengatur masalah pertanahan di DIY. Tentunya dengan mengacu pada Undang-undang Keistimewaan, termasuk membantu penyusunan Perdas Pertanahan.

Dalam kesempatan itu Prabukusumo menjelaskan, kepala daerah atau pejabat di pemerintah yang mendapat gelar dari kraton karena mengajukan. Gelar dan kenaikan pangkat disesuaikan dengan kedudukan dan pertimbangan pendidikan. Misalnya untuk gelar sarjana atau rektor tidak harus dimulai dari bawah.

"Sultan HB X juga memiliki hak untuk mengangkat langsung seseorang. Namun ini tidak mudah karena tetap mengikuti aturan yang ada di kraton. Misalnya memiliki jasa besar bagi kraton," tandas Prabukusumo.

Menantu Sultan, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro menambahkan, wisuda kenaikan pangkat abdi dalem akan mempengaruhi honor abdi dalem dari dana keistimewaan. Namun hal ini sudah mengikuti aturan dan syarat. "Yang dapat abdi dalem punokawan dapat paring dalem dari Ngarso Dhalam dan paring honor dari Dinas Kebudayaan," tambahnya.

(Ria)-b

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005